

[Paper00001]

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN  
BANYUMAS BAGIANTIMUR)**

**Deni Pratama<sup>1\*</sup>, Puji Lestari<sup>2</sup>, dan Umi Pratiwi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman, [pratamadeni862@gmail.com](mailto:pratamadeni862@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, [puji.lestari2506@gmail.com](mailto:puji.lestari2506@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, [umipratiwi.feunsoed@gmail.com](mailto:umipratiwi.feunsoed@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis survey menggunakan pendekatan kuantitatif dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), komitmen organisasi, motivasi kerja, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Somagede. Metode sampel jenuh yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan 51 sampel pemerintah desa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengisian kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah sekretaris desa dan bendahara desa. Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji kualitas data, statistika deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan aplikasi Siskeudes, komitmen organisasi, dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kesadaran dan pentingnya kualitas kinerja dalam pengelolaan dana desa mengingat alokasi dana desa selalu mengalami peningkatan setiap tahun.

**Kata Kunci:** Siskeudes, komitmen, motivasi, transparansi, kinerja, dana desa.

**Abstract**

*This research is a survey type research using a quantitative approach with the title "Factors Affecting Village Government Performance in Village Fund Management". This study aims to determine whether the factors of implementing the Village Financial System (Siskeudes) application, organizational commitment, work motivation, and transparency affect the performance of the village government in managing village funds. The research was conducted at the village government in Kalibagor District, Sokaraja District, Banyumas District, and Somagede District. The saturated sample method used in this study resulted in 51 village government samples. The data collection method used is filling out a questionnaire. Respondents in this study were the village secretary and village treasurer. Data analysis techniques used include data quality tests, descriptive statistics, classical assumption tests, multiple regression tests, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the application of the Siskeudes application, organizational commitment, and work motivation has no effect on the performance of the village government in managing village funds and transparency has a positive effect on the performance of the village government. This research implies that the village government and the local government of Banyumas Regency to increase socialization regarding awareness and the importance of quality performance in managing village funds considering that the allocation of village funds always increases every year.*

**Key Words:** Siskeudes, commitment, motivation, transparency, performance, village funds.

---

## PENDAHULUAN

Hierarki terendah dalam tingkatan organisasi sektor publik di Indonesia yaitu pemerintah desa berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta membantu proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Banyumas memperoleh skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,6988 menunjukkan mayoritas desa di Kabupaten Banyumas merupakan desa berkembang. Penggunaan anggaran pada desa berkembang sebenarnya sudah mampu dikelola dengan baik, hanya saja kinerja pemerintah desa masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata (ditjenppmd.kemendesa.go.id, 2021).

Letak geografis Kabupaten Banyumas bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Terdiri dari Kecamatan Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Somagede. Setiap kecamatan terdiri dari desa yang berbeda tingkat pembangunannya berdasarkan IDM. Apabila dibandingkan dalam satu wilayah tersebut, hanya terdapat satu desa yang termasuk desa mandiri yaitu Desa Kalibagor di Kecamatan Kalibagor. Mayoritas desa di Kecamatan Somagede termasuk desa maju sedangkan mayoritas desa di Kecamatan Kalibagor, Sokaraja, dan Banyumas termasuk desa berkembang (ditjenppmd.kemendesa.go.id, 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencanangkan tambahan formula alokasi kinerja yang diperuntukkan bagi pemerintah desa dengan kinerja baik. Penghargaan bagi desa dengan kinerja baik yaitu penyaluran dana desa dipercepat dengan proporsi 60% tahap I dan 40% di tahap II. Di sisi lain pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang baik (Bhakti, 2020). Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa mendefinisikan dana desa merupakan dana untuk tiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peningkatan alokasi dana desa menjadi sasaran penyalahgunaan. Salah satu kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Plana Kecamatan Somagede tahun 2016 – 2018. Keduanya dianggap merugikan negara sekitar Rp 400 juta, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Plana tahun 2016 – 2018 sekitar 1,2 miliar untuk pos kegiatan fisik dan infrastruktur (Setiawan, 2020).

Prioritas penggunaan dana desa juga berubah setiap tahunnya dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Banyumas berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2020 menduduki urutan pertama dibandingkan dengan kabupaten lain dalam satu keresidenan. Jumlah yang diterima masing-masing kabupaten yakni Kabupaten Banyumas menerima alokasi dana desa sebesar Rp 381.798.090.000, Kabupaten Cilacap sebesar Rp 269.800.979.000, Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 268.003.259.000, dan terendah yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 248.095.972.000 (djpk.kemenkeu.go.id, 2020).

Dana desa yang cukup besar di Kabupaten Banyumas menjadi mandat pemerintah desa. Dari sudut pandang *good government governance* kinerja Pemerintah Desa Klinting, Kecamatan Somagede dalam pengelolaan APBDes sebenarnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja masih menemui kendala antara lain regulasi yang berubah-ubah, kurangnya bimbingan dari Pemerintah Daerah, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang masih belum sempurna, kompleksitas pencairan dana desa, dan kurang efektifnya transparansi anggaran secara *online*. Secara keseluruhan kualitas kinerja pemerintah desa berdasarkan asas- asas *good government governance* sudah cukup baik (Prabowo, 2018).

Tujuan organisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai melalui kinerja unggul pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang memiliki unsur kepala desa dan dibantu perangkat desa. Pengukuran kinerja mutlak dibutuhkan pada organisasi pemerintahan di Indonesia sebagai dampak penerapan anggaran berbasis kinerja melalui kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan

dengan tujuan yang telah ditetapkan (Halim & Kusufi, 2014:114). Secara khusus penilaian kinerja yang mengarah pada kinerja manajerial dapat menjadi alat pengendalian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa.

Mahoney et al., (1963) mendefinisikan kinerja manajerial merupakan kemampuan pimpinan suatu organisasi dalam menjalankan tanggung jawab diantaranya perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Kinerja manajerial erat kaitannya dengan teori penetapan tujuan karena didalamnya manajer berupaya mencapai tujuan organisasi (Locke, 1968). Teori tersebut memposisikan antara pemerintah (agen) terdorong menunjukkan kinerja terbaik kepada masyarakat (prinsipiel). Tidak hanya menunjukkan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, tetapi juga pemerintah desa harus mampu beradaptasi dalam modernisasi sektor publik berkaitan dengan konsep *New Public Management* (NPM) (Mahmudi, 2003).

Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi sektor publik harus digunakan untuk pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa memerlukan pertanggungjawaban dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Tahapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menjalankan mandat dari pemerintah pusat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa (Bawono & Setyadi, 2019b:109).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa yaitu penerapan aplikasi Siskeudes. Sulina et al., (2017) menegaskan adanya Siskeudes memberikan banyak kelebihan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Watulingas et al., (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa aplikasi Siskeudes menjadikan kinerja pemerintah desa lebih efektif dan efisien. Selaras dengan teori penetapan tujuan dalam menunjukkan kinerjanya, perkembangan teknologi seperti penerapan Siskeudes menjadi salah satu gambaran konsep NPM.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan aplikasi Siskeudes terhadap kinerja pemerintah desa telah dilakukan oleh Saifudin (2018) dan Wahyudi et al. (2019) yang menemukan adanya pengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Serupa dengan penelitian tersebut, Lestari & Mutoriqoh (2020) menyimpulkan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Samad (2019) dan Wahyudi (2020) menyimpulkan penerapan aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa yaitu komitmen organisasi. Robbins & Judge (2013:109) mendefinisikan komitmen organisasi adalah keinginan seorang karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dan identifikasi dirinya dengan tujuan organisasi. Tingkat komitmen organisasi berkaitan dengan kinerja pemerintah desa karena dalam teori penetapan tujuan manajer mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan bersama organisasi. Tidak hanya itu, perkembangan dinamis dalam konsep NPM menuntut adanya komitmen pemerintah desa.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa telah dilakukan oleh Rulyanti et al. (2017), Taufiqillah & Fasochah (2018), Nasir et al. (2020), serta Winarni & Rahmaningtyas (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhazizal et al. (2019) serta Fitria & Wibisono (2019) menemukan hasil berbeda yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa yaitu motivasi kerja. Robbins & Judge (2013:236) menyebutkan motivasi merupakan proses yang menerangkan intensitas, arah, dan ketekunan individu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi menjadi salah satu pijakan dalam teori penetapan tujuan yang mendorong seseorang menjadi lebih baik dalam bekerja. Dorongan untuk menjadi lebih baik juga dibutuhkan dalam perubahan sistem kinerja dalam konsep NPM.

Winarni & Rahmaningtyas (2020) dalam penelitiannya menegaskan motivasi sangat penting bagi

berangkat desa. Kemudian beberapa penelitian terdahulu mengenai adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja pemerintah desa telah dilakukan oleh Mardika (2018) dan Winarni & Rahmaningtyas (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati & Heriningsih (2019) menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa yaitu transparansi. Transparansi yaitu masyarakat berhak mengakses dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan (Halim & Kusufi, 2014:104). Keterbukaan dalam memperoleh informasi menjadi faktor penting dalam teori penetapan tujuan karena masyarakat dapat menilai kualitas pencapaian kinerja pemerintah desa.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan oleh M. Putri et al. (2018) serta Setyawan & Nasehati (2018) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil serupa yaitu adanya pengaruh transparansi terhadap kinerja ditemukan melalui penelitian yang dilakukan oleh Novatiani et al. (2019) pada perangkat daerah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Aqfir (2020) pada pemerintah desa serta Lestari & Mutoriqoh (2020) pada pemerintah daerah membuktikan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Ulfah (2018). Kesamaan dengan penelitian tersebut ialah lokasi penelitian, variabel dependen, dan keterkaitan dana desa sedangkan perbedaan penelitian terletak pada pemilihan variabel independen, landasan teori, dan penentuan sampel yang digunakan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh penerapan aplikasi Siskeudes terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (2) pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (3) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (4) pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan pada dasarnya menjadikan keinginan mencapai tujuan sebagai pokok dari dorongan kinerja. Suatu tujuan secara tidak langsung memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan dan besarnya usaha yang dikeluarkan (Locke, 1968). Implementasi teori penetapan tujuan dapat dilakukan melalui program Manajemen berdasarkan Tujuan (*Management by Objective-MBO*) (Robbins & Judge, 2013:240-241). Implikasi teori penetapan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan tujuan tertentu baik khusus maupun umum yang tertulis dalam visi dan misi organisasi.

#### 2. Konsep *New Public Management* (NPM)

Konsep ini secara sederhana merupakan upaya modernisasi sistem organisasi sektor publik (Hughes, 1998). Implementasi NPM pada negara berkembang masih menimbulkan pro dan kontra (Puspawati, 2016). Ciri-ciri anggaran dengan pendekatan NPM yaitu komprehensif/komparatif, terhubung antardepartemen, rasionalitas dalam pengambilan keputusan, analisis manfaat biaya, berorientasi pada input, output, dan *outcome*, serta adanya pengawasan kinerja (Hariadi et al., 2013:9).

#### 3. Dana Desa

Istilah desa di Indonesia merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa (Bawono & Setyadi, 2019a:1). Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM menjadi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Dana desa dari APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa dikelola

pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan dana desa. Adapun pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Bawono & Setyadi, 2019b:107).

#### 4. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh selama periode waktu tertentu oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* (Fahmi, 2014). Kemudian, secara spesifik Nasucha (2004) menjelaskan kinerja organisasi dianggap sebagai efektivitas organisasi yang berkaitan dengan usaha-usaha sistematis dan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tolok ukur kinerja menjadi dasar untuk menilai apakah suatu program dinyatakan berhasil atau gagal (Halim & Kusufi, 2014:124). Selanjutnya Ermawati (2017) menegaskan kinerja merupakan kemampuan manajer dalam mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi, misi, dan sasaran kemudian dapat diukur sejauh mana pencapaiannya. Kinerja manajerial dalam konteks pemerintah desa dapat dianalogikan dengan pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan dana desa yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Bawono & Setyadi, 2019b:105).

#### 5. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Secara teknis transaksi keuangan desa dapat ditangani secara mudah dengan database *Microsoft Access* karena masih dalam skala kecil. Penggunaan *database SQL Server* dalam aplikasi Siskeudes hanya diperuntukkan apabila pemerintah desa memiliki volume transaksi dalam skala menengah (BPKP & Kemendagri, 2018).

#### 6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai kesetiaan karyawan terhadap organisasi dengan cara menunjukkan sikap untuk tetap bertahan dalam organisasi, mendukung visi organisasi, dan tidak berkeinginan untuk keluar dari organisasi dengan alasan apapun (Yusuf & Syarif, 2018:32). Selanjutnya Steers (1988) dalam (Yusuf & Syarif, 2018:39) membedakan komitmen organisasi menjadi tiga faktor yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu sikap dalam studi perilaku organisasi. Komitmen organisasi dan produktivitas kerja memiliki keterkaitan erat meskipun sangat sederhana. Komitmen organisasional terbagi menjadi tiga dimensi terpisah yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif (Robbins & Judge, 2013:101).

#### 7. Motivasi Kerja

Manajer, akuntan, dan karyawan harus saling mendorong atau memotivasi dalam mencapai tujuan organisasi agar kinerja yang diharapkan dapat tercapai (Lubis, 2011:84). Robbins & Judge (2013:222) mendefinisikan motivasi adalah suatu proses yang menguraikan intensitas, arah, dan ketekunan individu untuk mencapai tujuannya. Bentuk dasar motivasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik (Fahmi, 2014).

#### 8. Transparansi

Transparansi dapat didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi memungkinkan setiap orang berhak mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan atau masih dalam batas wajar (Fitriyani et al., 2020). Dwiyanto (2017:235) menguraikan transparansi merupakan suatu konsep yang menunjukkan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh para pengguna dan *stakeholders* dengan mudah ketika dibutuhkan. Transparansi menjadi salah satu unsur tata kelola pemerintahan yang baik dibangun atas dasar kebebasan arus informasi (Halim & Iqbal, 2012). Proses implementasi kebijakan dari tahap perumusan hingga hasil-hasil yang dicapai terjamin akses informasinya (Hendratmi et al., 2017).

**B. Perumusan Hipotesis**

**1. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Penerapan aplikasi Siskeudes mengarahkan para pegawai agar dapat bekerja lebih maksimal serta dapat menghasilkan sebuah laporan yang dapat memberikan informasi yang tepat. Manfaat lain aplikasi Siskeudes yang dirasakan pemerintah desa yaitu pekerjaan yang dilakukan lebih terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perangkat desa yang menerapkan aplikasi Siskeudes dapat mendeteksi kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Sulina et al., 2017). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan aplikasi Siskeudes terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan oleh Saifudin (2018), Wahyudi et al. (2019), serta Lestari & Mutoriogh (2020) menunjukkan hasil yang positif.

Saat ini pengelolaan keuangan cenderung menggunakan suatu sistem yang lebih mumpuni supaya menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan akuntabel. Sistem manual sudah mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan aplikasi atau *software* yang dinilai lebih memudahkan pengguna. Perangkat desa sebagai pengelola keuangan atau agen dalam konsep NPM dituntut menunjukkan kinerja unggul yang menjadi wujud dari tujuan pengelolaan keuangan. Dengan demikian diperlukan suatu perangkat pendukung kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan termasuk dana desa yaitu aplikasi Siskeudes. Selanjutnya setelah diuraikan beberapa penelitian terdahulu dan hubungan teori yang digunakan maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.**

**2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Kesetiaan pegawai atau karyawan dalam organisasi menunjukkan semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi. Perilaku dan tindakan karyawan yang menyatu dengan organisasi menjadi wujud rasa tanggung jawab dan konsekuen terhadap keberhasilan organisasi. Uraian tersebut secara garis besar merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti et al. (2017), Taufiqillah & Fasochah (2018), Nasir et al. (2020), serta Winarni & Rahmaningtyas (2020) bahwasannya komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan pada dasarnya melalui suatu proses atau tahapan demi tercapainya tujuan organisasi. Perangkat desa selaku pengelola keuangan desa memerlukan suatu komitmen yang tinggi sehingga tujuan atau sasaran dana desa sebagai bagian dari keuangan desa dapat tercapai dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tidak hanya tujuan, tetapi juga perkembangan pola kinerja yang dinamis memerlukan suatu sikap identifikasi perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dimensi komitmen yang terdiri komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif dinilai mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.**

**3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Bagi pemerintah desa motivasi kerja sangat penting karena pada dasarnya motivasi menjadi kebutuhan manusia dalam bekerja. Motivasi menjadi pendorong seorang pegawai termasuk pemerintah desa dalam mencapai tujuan organisasi (Winarni & Rahmaningtyas, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mardika (2018) serta Winarni & Rahmaningtyas (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja pemerintah desa. Ketika motivasi semakin tinggi maka kinerja yang ditunjukkan pemerintah desa juga semakin baik.

Berdasarkan teori penetapan tujuan, organisasi memiliki suatu struktur yang terdiri dari

beberapa bidang. Setiap bidang menerapkan konsep manajerial yang terdiri dari beberapa tahapan.

Pada tahap perencanaan program yang tertera dalam pembahasan anggaran berkaitan dengan berapa banyak biaya yang dikeluarkan menjadi pendorong anggota dalam setiap bidang. Secara spesifik pada pemerintah desa motivasi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga hingga tahap pertanggungjawaban membutuhkan suatu pendorong atau motivasi dari setiap aparatur sektor publik. Terlebih lagi spirit tersebut menjadi gambaran kinerja pemerintah desa sehubungan dengan konsep *New Public Management*. Dengan demikian berdasarkan uraiankaitan teori dan penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh motivasi terhadap kinerja pemerintah desa maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.**

#### **4. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Mandat dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus ditujukan untuk kepentingan orang banyak dan ada keterbukaan akses informasi kepada masyarakat serta penyediaan ruang berpartisipasi bagi masyarakat. Mekanisme transparansi apabila diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah desa. Intinya, kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, seperti yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan oleh Putri et al. (2018), Setyawan & Nasehati (2018) serta Novatiani et al. (2019) bahwasannya transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan teori penetapan tujuan dan konsep *New Public Management* memerlukan suatu pengawasan terutama dari masyarakat. Transparansi atau keterbukaan apabila terlaksana dengan baik menjadi fitur yang memudahkan pengawasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Berkat adanya transparansi kemungkinan penyalahgunaan dana desa yang kerap terjadi dilakukan oleh pemerintah desa dapat berkurang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.**

#### **METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian: (1) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti hubungan antarvariabel. Penelitian kuantitatif lebih bersifat objektif (Hartono, 2017); (2) Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Somagede wilayah Kabupaten Banyumas bagian timur; (3) Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa, komitmen organisasi, motivasi kerja, transparansi, dan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (4) Penelitian ini menggunakan jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari sumber pertama (Suliyanto, 2018:156); (5) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengisian kuesioner untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepada responden (Suliyanto, 2018:167). Kuesioner penelitian terdiri dari identitas responden, pernyataan tertutup, dan pertanyaan terbuka diisikan secara tertulis oleh pemerintah desa di Kecamatan Somagede, Kalibagor, Sokaraja, dan Banyumas wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebaran kuesioner dilakukan selama bulan Agustus dan bulan September tahun 2021. Pengisian kuesioner tiap pemerintah desa diwakili oleh sekretaris desa dan bendahara desa karena berwenang sebagai pejabat pengelola keuangan desa dan lebih memahami maksud dari kuesioner penelitian; (6) Populasi dalam penelitian ini yaitu 51 desa (banyumaskab.bps.go.id, 2021) tersebar di Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Populasi penelitian ini cukup kecil sehingga metode sampel jenuh digunakan atau penggunaan seluruh populasi sebagai

sampel penelitian. Penggunaan metode tersebut menghasilkan 51 desa sebagai sampel penelitian. Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal 30 sampel penelitian yang menggunakan analisis data statistik (Agung & Yuesti, 2013:40).

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel: (1) Kinerja Pemerintah Desa (Y), tolok ukur kinerja menjadi dasar untuk menilai keberhasilan suatu program (Halim & Kusufi, 2014:124). Adapun indikator yang dijadikan pengukuran sepuluh pertanyaan variabel kinerja pemerintah desa menurut Tarjo (2020) yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban; (2) Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( $X_1$ ), pengembangan aplikasi Siskeudes menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyokong tata Kelola pemerintah desa yang baik dan akuntabel (Watulingas et al., 2019). Pengukuran variabel terdiri dari 13 pernyataan menggunakan indikator pengukuran menurut Wahyudi (2020) yaitu kemudahan penggunaan, kepuasan pengguna, ketepatan waktu, fitur keamanan, dan ekonomis; (3) Komitmen Organisasi ( $X_2$ ), komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai kesetiaan karyawan terhadap organisasi apapun (Yusuf dan Syarif, 2018:32). Pengukuran variabel terdiri dari Sembilan pernyataan menggunakan indikator menurut menurut Robbins & Judge (2013:101) yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif; (4) Motivasi Kerja ( $X_3$ ), motivasi kerja merupakan suatu kondisi dimana individu berusaha bekerja sebaik mungkin tanpa dipaksa berkat dorongan yang muncul dalam diri individu tersebut (Ermawati, 2017). Pengukuran terdiri dari sembilan pernyataan. Adapun indikator pengukuran variabel motivasi kerja menurut Winarni & Rahmaningtyas (2020) yaitu keberadaan (*existence needs*), hubungan (*relatedness needs*), dan pertumbuhan (*growth need*); (5) Transparansi ( $X_4$ ), transparansi menjadi faktor penting bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pengukuran variabel transparansi terdiri dari sembilan pernyataan. Adapun indikator pengukuran variabel transparansi menurut Lestari & Mutoriqoh (2020) yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Penelitian menggunakan skala likert untuk mengukur variabel dependen (Y) dan independen (X). Menurut (Hartono, 2017) skala likert digunakan untuk mengukur jawaban subjek dalam lima nilai skala dengan jarak yang sama. Skor STS (1), TS (2), N (3), S (4), dan SS (5).

Teknik analisis data: (1) Penelitian ini menggunakan *pilot test* yang dibagikan ke 30 responden untuk menguji kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas; (2) Frekuensi, pengukur tendensi pusat, dispersi, dan pengukur – pengukur bentuk disediakan oleh statistika deskriptif (Hartono, 2017:195); (3) Model regresi harus terbebas dari masalah asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas; (4) Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel; (5) Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan atau mendekati 1 maka dapat diketahui semakin kuatnya pengaruh variabel independen; (6) Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependennya; (7) Pengujian hipotesis dalam penelitian yaitu jika nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel maka suatu variabel dinyatakan memiliki pengaruh (Suliyanto, 2011:62).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

Pejabat pengelola keuangan desa dari setiap pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan bendahara desa menjadi responden dalam penelitian ini. Setiap desa dibagikan 2 eksemplar kuesioner yang diisi oleh sekretaris desa dan bendahara desa sehingga dapat diketahui total kuesioner yang dibagikan sejumlah 102 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung pada tanggal 16 Agustus sampai 16 September 2021. Dari 102 kuesioner yang dibagikan, sejumlah 94 kuesioner kembali dan dapat diolah sehingga tingkat pengembaliannya sebesar 92%. Kuesioner yang kembali diperoleh dari 47 pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu penyebaran kuesioner sehingga terdapat empat pemerintah desa yang tidak mengembalikan kuesioner.

## Analisis Data

### 1. Hasil Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan *pilot test* untuk menguji kualitas data. Responden *pilot test* merupakan 30 mahasiswa jurusan S1-Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman yang telah mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik. Hasil *pilot test* menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan lolos uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas juga dilakukan pada data yang diperoleh dari responden sesungguhnya. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa data yang diperoleh dari responden sesungguhnya lolos uji validitas dan reliabilitas.

### 2. Hasil Statistika Deskriptif

Tabel 1. Output Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	MIN	Max.	Mean	Std. Dev
Penerapan Aplikasi Siskeudes (X <sub>1</sub> )	47	3,6	4,8	4,153	0,2911
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	47	3,5	4,8	4,149	0,3092
Motivasi Kerja (X <sub>3</sub> )	47	3,4	4,6	4,091	0,2595
Transparansi (X <sub>4</sub> )	47	3,6	4,8	4,187	0,2886
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	47	3,7	5,0	4,315	0,3064

Angka tersebut diolah berdasarkan jawaban dari responden sesungguhnya. Angka tersebut merepresentasikan bahwa kinerja pemerintah desa, penerapan aplikasi Siskeudes, komitmen organisasi, motivasi kerja, dan transparansi dinilai sudah baik.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Tabel 2. Output Uji Normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*

Variabel	Standar Residual	Alpha	Keterangan
<i>Test Statistic</i>	0,124	≥ 0,05	Normal
<i>Asymptotic Sig.</i>	0,070	≥ 0,05	Normal

#### b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Output Uji Multikolinieritas menggunakan metode *VIF* dan *tolerance*

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Aplikasi Siskeudes (X <sub>1</sub> )	0,343	2,912	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	0,434	2,304	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Motivasi Kerja (X <sub>3</sub> )	0,569	1,757	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Transparansi (X <sub>4</sub> )	0,241	4,154	Tidak Terjadi Multikolinieritas

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Output Uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *Park*

Variabel Independen	Nilai Sig.	alpha	Keterangan
Penerapan Aplikasi Siskeudes (X <sub>1</sub> )	0,899	> 0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	0,135	> 0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Motivasi Kerja (X <sub>3</sub> )	0,412	> 0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Transparansi (X <sub>4</sub> )	0,385	> 0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

d. Uji Linieritas

Tabel 4. Output Uji Linieritas menggunakan metode *Lagrange Multiplier*. Penghitungan =  $47 \times 0,000 = 0,000$ . Nilai tersebut kurang dari nilai  $X^2$  sebesar 64,001.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.017 <sup>a</sup>	.000	-.095	2.11441784

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi, Penerapan Aplikasi Siskeudes

4. Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 5. Output Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.
Penerapan Aplikasi Siskeudes(X <sub>1</sub> )	-0,064	-0,452	1,682	0,654
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	0,151	0,870	1,682	0,389
Motivasi Kerja (X <sub>3</sub> )	0,202	1,127	1,682	0,266
Transparansi (X <sub>4</sub> )	0,719	2,915	1,682	0,006
Konstanta	6,330			
F hitung	13,719			
F Sig.	0,000			
R Square	0,566			
Adjusted R Square	0,525			

Melalui tabel hasil pengujian regresi berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 6,330 - 0,452X_1 + 0,870X_2 + 1,127X_3 + 2,915X_4 + e$$

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Penelitian ini menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,525 dari rentang nilai 0-1. Hal tersebut menunjukkan variabel kinerja pemerintah desa memiliki kesesuaian hubungan dengan variabel penerapan aplikasi Siskeudes, komitmen organisasi, motivasi kerja, dan transparansi sebesar 0,525 atau 52,5%. Sisanya sebesar 0,475 atau 47,5% memiliki hubungandengan variabel lain di luar penelitian.

6. Hasil Uji F

Perbandingan antara nilai F<sub>hitung</sub> dan nilai F<sub>tabel</sub> menunjukkan nilai 13,719 > 2,594 sedangkan nilai F signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi dalam penelitian ini dinyatakan fit serta variabel independen penerapan aplikasi Siskeudes, komitmen organisasi, motivasi kerja, dan transparansi berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen kinerja pemerintah desa.

7. Hasil Pengujian Hipotesis

**Hipotesis Pertama**

Variabel independen penerapan aplikasi Siskeudes (X<sub>1</sub>) memiliki nilai signifikansi (0,654) > nilai *alpha* (0,05) dan nilai t<sub>hitung</sub> (0,452) ≤ nilai t<sub>tabel</sub> (1,682) ke arah negatif. Hasil tersebut menunjukkan H<sub>01</sub> diterima dan H<sub>a1</sub> ditolak dalam arti lain penerapan aplikasi Siskeudes (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa (Y). Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

**Hipotesis Kedua**

Variabel independen komitmen organisasi (X<sub>2</sub>) memiliki nilai signifikansi (0,389) > nilai *alpha* (0,05) serta nilai t<sub>hitung</sub> (0,870) ≤ nilai t<sub>tabel</sub> (1,682) ke arah positif. Hasil tersebut menunjukkan H<sub>01</sub> diterima

dan  $H_{a1}$  ditolak dalam arti lain komitmen organisasi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa (Y). Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. **Hipotesis Ketiga**

Variabel independen motivasi kerja ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi ( $0,266 > \text{nilai } \alpha (0,05)$  serta nilai  $t_{hitung} (1,127) \leq \text{nilai } t_{tabel} (1,682)$  ke arah positif. Hasil tersebut menunjukkan  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak dalam arti lain motivasi kerja ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

#### **Hipotesis Keempat**

Variabel independen transparansi ( $X_4$ ) memiliki nilai signifikansi ( $0,006 \leq \text{nilai } \alpha (0,05)$  serta nilai  $t_{hitung} (2,915) > \text{nilai } t_{tabel} (1,682)$  ke arah positif. Hasil tersebut menunjukkan  $H_{01}$  diterima ditolak dan  $H_{a1}$  diterima dalam arti lain motivasi kerja ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa (Y). Dengan demikian hipotesis keempat diterima.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil koefisien regresi menunjukkan arah negatif yaitu apabila penerapan aplikasi Siskeudes meningkat maka kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa menurun. Penerapan aplikasi Siskeudes sebenarnya sudah baik namun tidak semua pejabat pengelolaan dana desa memahami penerapan aplikasi Siskeudes. Hal ini diperkuat dengan ketidaksetujuan dan keraguan responden berkaitan dengan kemampuan penerapan aplikasi Siskeudes dalam mencegah keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban atau SPJ pemerintah desa. Selain itu, mayoritas responden merupakan lulusan SMA. Tingkat pendidikan tersebut dinilai belum tentu mudah memahami penggunaan menu aplikasi Siskeudes yang selalu mengalami pembaruan.

Hasil penelitian ini tidak membuktikan kedua konsep teori yang digunakan. Pada kenyataannya penerapan aplikasi Siskeudes mengalami kendala dari sisi teknis maupun pengguna sehingga menurunkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Samad (2019) dan Wahyudi (2020) bahwa penerapan aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2018), Wahyudi et al. (2019), serta Lestari & Mutoriqoh (2020) menyatakan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

### **2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu apabila komitmen organisasi meningkat maka kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Komitmen organisasi pemerintah desa pada dasarnya sudah baik namun hasil pengujian statistik membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh keraguan responden merujuk pada jawaban responden berkaitan dengan komitmen normatif pemerintah desa. Loyalitas pemerintah desa terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah dinilai rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori penetapan tujuan dan konsep NPM karena kecenderungan perilaku yang muncul bukan komitmen organisasi melainkan tekanan dari internal maupun eksternal pemerintah desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhazizal et al. (2019) dan Fitria & Wibisono (2019) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti et al. (2017), Taufiqillah & Fasochah (2018), Nasir et al. (2020), serta Winarni & Rahmaningtyas (2020) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

**3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu apabila motivasi kerja meningkat maka kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Motivasi kerja pemerintah desa pada dasarnya sudah baik namun hasil pengujian statistik membuktikan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetujuan dan keraguan responden merujuk pada jawaban responden berkaitan dengan motivasi kerja akan keberadaan dirinya (*existence needs*) di pemerintah desa. Jawaban tersebut menandakan motivasi penggunaan dana desa demi kepentingan masyarakat dinilai rendah karena pemerintah desa tidak menjadikan peran dan tanggung jawab pengelolaan dana desa sebagai prioritas. Dominasi lama jabatan responden 1-10 tahun cenderung menjadikan motivasi kerja tidak stabil karena penyesuaian dengan lingkungan kerja pemerintah desa sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan desa.

Hasil penelitian ini tidak membuktikan teori penetapan tujuan dan konsep NPM karena pada kenyataannya pemerintah desa tidak memprioritaskan dan kurang menyesuaikan diri dengan tugas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati & Heriningsih (2019) menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mardika (2018) serta Winarni & Rahmaningtyas (2020) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

**4. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa atau sebaliknya semakin rendah transparansi maka semakin rendah pula kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Transparansi pemerintah desa pada dasarnya sudah baik. Hasil pengujian statistik menunjukkan pengaruh positif transparansi terhadap kinerja pemerintah desa didukung oleh jawaban responden yang menyatakan setuju untuk setiap pertanyaan berkaitan dengan prinsip informatif, keterbukaan, dan pengungkapan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan setiap pemerintah desa yang menerima alokasi dana desa cukup tinggi mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kesadaran pemerintah desa akan pentingnya transparansi disebabkan adanya pengawasan dari banyak pihak.

Hasil penelitian ini terbukti sesuai dengan teori penetapan tujuan dan konsep NPM. Sasaran pengelolaan yang hendak dicapai pemerintah desa memerlukan suatu keterbukaan atau transparansi. Kesenambungan antara keterbukaan dan pengawasan dari masyarakat menjadi aspek utama transparansi serta pemicu meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Adanya akses masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa merupakan suatu implikasi dari konsep NPM. Hal tersebut menandakan semakin baiknya kinerja pemerintah desa karena penggunaan dana desa bisa dikatakan jauh dari praktik penyalahgunaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2018), Setyawan & Nasehati (2018) pada pemerintah desa serta Novatiani et al. (2019) pada perangkat daerah bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Aqfir (2020) pada pemerintah desa dan Lestari & Mutoriqoh (2020) pada pemerintah daerah membuktikan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (2) Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (3) Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa; (4) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Implikasi penelitian ini yaitu: (1) Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes yang lebih terstruktur supaya manfaat aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa dapat dirasakan lebih tinggi oleh pemerintah desa; (2) Pemerintah daerah dapat mendukung upaya tersebut melalui sosialisasi penguatan karakter pemerintah desa yang lebih bertanggungjawab dan berintegritas; (3) Dorongan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kerjanya dalam pengelolaan dana desa perlu diperbaiki melalui aspek internal dan eksternal; (4) Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah desa agar selalu terbuka akan penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Keterbatasan dan saran penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini hanya mencakup wilayah Kabupaten Banyumas bagian timur dan belum mampu merepresentasikan pemerintah desa secara umum. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian yang mencakup wilayah lebih luas; (2) Penyebaran kuesioner terkendala pandemi Covid-19 dan rendahnya antusias responden karena bersamaan dengan agenda pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran dan persiapan musyawarah desa tahun anggaran 2022. Penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan waktu dan situasi pada saat pengumpulan data; (3) Variabel independen dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 0,525 atau 52,5% terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Angka tersebut mengindikasikan masih ada pengaruh variabel lain sebesar 0,475 atau 47,5% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang termasuk dalam studi keperilakuan seperti locus of control, kompetensi, budaya organisasi, dan lain sebagainya sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

## REFERENSI

- Abdullah, M., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *Indonesian Journal on Information System*, 4(1), 13–24.
- Agung, A. A. P. A., & Yuesti, A. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif* (I. N. Suardhika (ed.); 1st ed., Vol. 1). CV. Noah Aletheia: Bali.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, & Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*. <http://www.bpkp.go.id>
- Banyumaskab.bps.go.id. (2021). *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2021* (B. K. Banyumas (ed.)). Banyumas: CV. Prima Puspa Sari. <https://doi.org/33020.2103>
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019a). *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia* (Junaidi, R. Utami, & 5. Novita (eds.)). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019b). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Junaidi & C. K. Untari (eds.)). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bhakti, A. P. (2020). *Tahun 2020, Desa berkinerja baik dapat tambahan Dana*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tahun-2020- desa-berkinerja-baik-dapat-tambahan-dana/>
- ditjenppmd.kemendesa.go.id. (2021). *IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Masyarakat Desa. <https://idm.kemendesa.go.id/>

- djpk.kemenkeu.go.id. (2020). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan \_ Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Dalam APBN Tahun Anggaran 2020*. Direktorat Jenderal Pembangunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (T. U. Press (ed.)). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ermawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 141. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.141-156>
- Fahmi, I. (2014). *Perilaku Organisasi* (A. M. Djalil (ed.); 2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2019). Regulasi , Komitmen Organisasi , Sumber Daya Manusia , dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33021/jaaf.v3i1.680>
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Absor, M. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal EKSOS*, 2(2), 132–139.
- Ghani, N. M. A., Yunus, N. S. N. M., & Bahry, N. S. (2016). Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 46–51. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30091-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30091-0)
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rd ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik* (E. S. Suharsi (ed.); 2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (L. Alfiah (ed.)). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (6th ed.). Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Hendratmi, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(2), 76–93.
- Hughes, O. E. (1998). *Public Management and Administration* (2nd ed.). London: Palgrave. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-26896-2>
- Kasmiah. (2019). Pengaturan Sasaran dalam Tim: Kejelasan Tujuan dan Tim Kinerja di Sektor Publik. *Meraja Journal*, 2(3), 41–51.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2003). *Organizational Behavior* (6th ed.). McGraw Hill: Irwin.
- Lestari, U. P., & Mutoriqoh. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal) Utami. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Locke, E. A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(3), 157–189.
- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi Keperilakuan* (Krista (ed.); 2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.iss1.art5>
- Mahoney, T. A., Jerdee, T. H., & Garoll, S. J. (1963). *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati: Southwestern Publishing Co.
- Mardika, N. H. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Nagari. *Jurnal Benefita*, 3(2), 182–195. <https://doi.org/DOI :10.22216/jbe.v3i1.2061>
- Nasir, M., Basalamah, J., & Murfat, M. Z. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional , Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Equilibrium Journal*, 1(2), 1–11. <http://journal.ildikti9.id/Equilibrium>
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo. Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–

61.

- Nurhazikal, Basri, Y. M., & Nasir, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 80–92.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2020. (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. (2020).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014).
- Prabowo, K. A. (2018). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): Analisis dari Sudut Pandang Good Government Governance*. Jenderal Soedirman University.
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 429–440. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. *Jurnal PUBLISIA*, 1(1), 38–53.
- Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen) Mayangsari. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 69–75.
- Robbins, P. S., & Judge, P. T. (2013). *Organizational Behavior* (S. Yagan (Ed.); 15th ed.). Pearson Education, Inc. [www.pearson.com/uk](http://www.pearson.com/uk)
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335.
- Saifudin. (2018). Pengaruh Implementasi Software Akuntansi terhadap Kinerja Perangkat Desa dengan Perceived Enjoyment sebagai Variabel Intervening. *Equilibria Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(2), 60–70. <https://doi.org/2615-6784>
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Peengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–19.
- Setiawan, B. (2020). *Kades dan Kadus Plana, Tersangka Dana ADD dan DD*. Suara Banyumas; Suara Banyumas. <https://suarabanyumas.com/kades-dan-kadus-plana-tersangka-dana-add-dan-dd/>
- S., & Nasehati, S. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Survey pada Desa-desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang). *Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper*.
- Sudaryati, D., & Heriningsih, S. (2019). Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi, dan Sistem Informasi Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(1), 33–47.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba - kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan - Teori dan Aplikasi dengan SPS* (S. F. Suyantoro (Ed.)). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (A. Cristian (Ed.); 1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Tarjo. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Desa. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 334–340.
- Taufiqillah, M. Z., & Fasochah. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Desa dengan

- Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perangkat Desa Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 25(45), 1–11.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Wahyudi, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 1–14.
- Wahyudi, A., Ngumar, S., & Suryono, B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi pada Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 111–131.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105–111.
- Winarni, & Rahmaningtyas, W. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kompetensi Perangkat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 261–276.  
<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37168>
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Economy Deposit Journal*, 2(2), 67–76.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2018). *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi, dan Mempengaruhi* (N. A. Saleh (Ed.)). Makassar: CV Nas Media Pustaka.